

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2021

<https://inhukab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2021





INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2021

ISBN : -
Nomor Publikasi : 14020.2125
Katalog : 4102004.1402
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 70 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Desain Kover oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Pencetak:
GMedia

Sumber Ilustrasi:
freepik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:
Sukarwanto, SST

Penanggung Jawab Teknis:
Yeri Ramadani, SST

Penyunting:
Yeri Ramadani, SST

Penulis:
Riva Ramadhana Ziani, S.Tr.Stat

Pengolah data:
Riva Ramadhana Ziani, S.Tr.Stat

Pembuat Infografis dan Gambar Kulit:
Riva Ramadhana Ziani, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu 2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu antar waktu. Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu 2015-2025.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Rengat, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Indragiri Hulu



Sukarwanto, SST



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
Singkatan dan Akronim	xiii
Bab 1. Kependudukan	1
Bab 2. Kesehatan dan Gizi	15
Bab 3. Pendidikan	23
Bab 4. Ketenagakerjaan	35
Bab 5. Taraf dan Pola Konsumsi	45
Bab 6. Perumahan dan Lingkungan	51
Istilah Teknis	67

DAFTAR TABEL

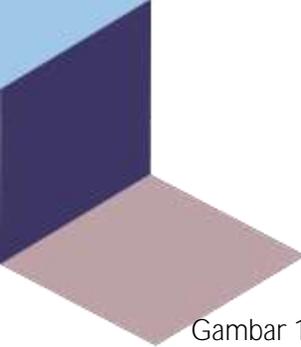
Tabel 1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021	4
Tabel 1.2	Kepadatan dan Komposisi Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021	7
Tabel 1.3	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	11
Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020	20
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020	21
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2020	22
Tabel 3.1	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	30
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	32
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	33
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021	39

Tabel 4.2	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021	42
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021	48
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	55
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terlulus di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	57
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terlulus di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	58
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terlulus di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	59
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan untuk Minum di Kabupaten Indragiri Hulu 2018-2020	60
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Indragiri Hulu 2018-2020	62
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa/Sumur Terlindung/Mata Air Terlindung Menurut Jarak ke Tempat Penampungan	63

Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Indragiri Hulu
2018-2020

Tabel 6.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	64
Tabel 6.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	65

<https://inhukab.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021	5
Gambar 1.2	Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021	8
Gambar 1.3	Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	9
Gambar 1.4	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat /Cara KB di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	12
Gambar 2.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	18
Gambar 3.1	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Huruf di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020	27
Gambar 3.2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2017-2021	29
Gambar 4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021	41
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita (m ²) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020	56

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih dan Layak di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

61

<https://inhukab.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Raskin	Beras Miskin
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

BAB I

KEPENDUDUKAN

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan ke depan.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dalam hal ini penduduk suatu kabupaten, memegang peran penting dalam pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Kemajuan suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diimbangi dengan kualitas penduduk akan menjadi kendala pembangunan.

Pengendalian jumlah penduduk diperlukan untuk mencegah ledakan penduduk yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. Jumlah

penduduk yang besar akan banyak membutuhkan fasilitas dasar seperti tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga banyak lapangan pekerjaan yang harus disediakan. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana agar kebutuhan dasar seluruh rakyat dapat tercukupi.

Guna mengetahui gambaran umum penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu, beberapa indikator demografi terpilih disajikan pada Tabel 1.1. Berdasarkan data proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibanding dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu menempati urutan kesembilan setelah Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, dan Pelalawan.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen/tahun) ^f	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	422.095	1,41	105,18
2018	427.771	1,34	105,99
2019	433.250	1,28	105,79
2020	438.533	1,22	105,59
2021	443.650	1,17	105,40

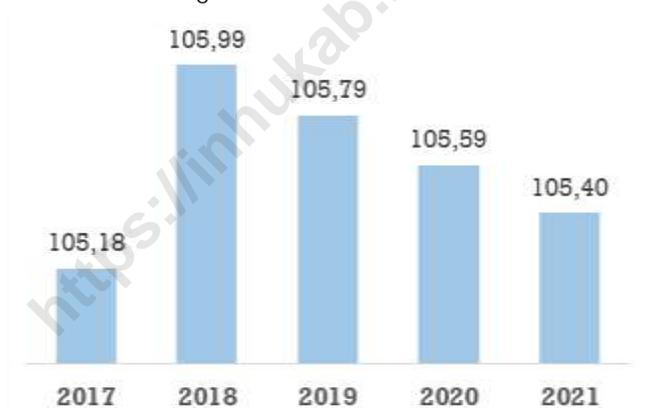
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025

Berdasarkan penghitungann Proyeksi Penduduk 2015-2025, jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 tercatat sebanyak 443.650 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sejumlah 5.117 jiwa dari jumlah penduduk di tahun 2020. Bila dibandingkan dengan lima tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu ini mengalami peningkatan sekitar 6,59 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu telah mengalami penambahan penduduk sebesar 27.429 jiwa.

Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, terlihat adanya kecenderungan yang menurun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tercatat sebesar 1,48 persen pada tahun 2016 dan menurun menjadi 1,17 persen pada tahun 2021.

Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 sebesar 105,40. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau dapat diartikan bahwa terdapat 105 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Rasio berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu beradapada kisaran 105 selama lima tahun terakhir.

Kepadatan dan Komposisi Penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin. Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah di wilayah tertentu. Seperti diketahui bahwa lebih dari 36 persen penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berada di Kecamatan Seberida, Rengat, dan Rengat Barat; sedang sisanya tersebar di luar tiga kecamatan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan luas wilayah 8.198,71 km², kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 mencapai 54 jiwa per km², terus mengalami perkembangan dari 51 jiwa per km² pada tahun 2017. Secara rata-rata, setiap km² di Kabupaten Indragiri Hulu ditempati oleh 54 penduduk pada tahun 2021. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Dari sisi komposisi penduduk terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia lebih dari 65 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, sementara itu jumlah penduduk tidak produktif yaitu penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan. Komposisi penduduk usia 15-64 tahun awalnya sebesar 66,80 persen pada tahun 2017 menjadi 67,92 persen pada tahun 2021. Namun sebaliknya yang terjadi pada komposisi penduduk usia 0-14 tahun yang menurun dari 29,98 persen menjadi 27,89 persen pada periode waktu yang sama. Sementara itu, penduduk pada usia 65 tahun ke atas ikut meningkat dari 3,22 persen menjadi 4,18 persen. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Kepadatan dan Komposisi Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021

Indikator Demografi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	51	52	53	53	54
Komposisi Penduduk (%)					
0-14 tahun	29,98	29,51	29,01	28,46	27,89
15-64 tahun	66,80	67,05	67,32	67,61	67,92
65+ tahun	3,22	3,44	3,68	3,93	4,18
Angka Beban Ketergantungan (%)	49,70	49,15	48,55	47,90	47,23

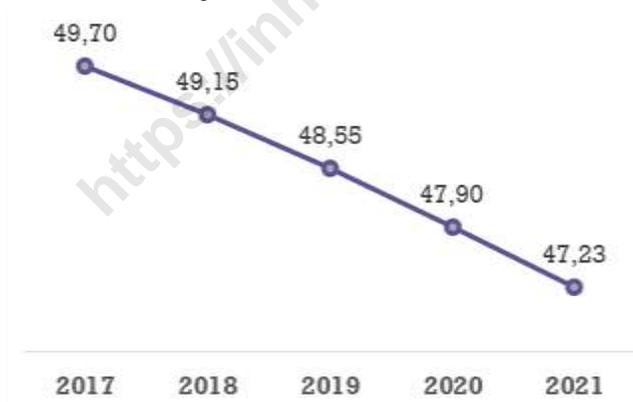
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban

ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka beban ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 sebesar 47,23 berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025

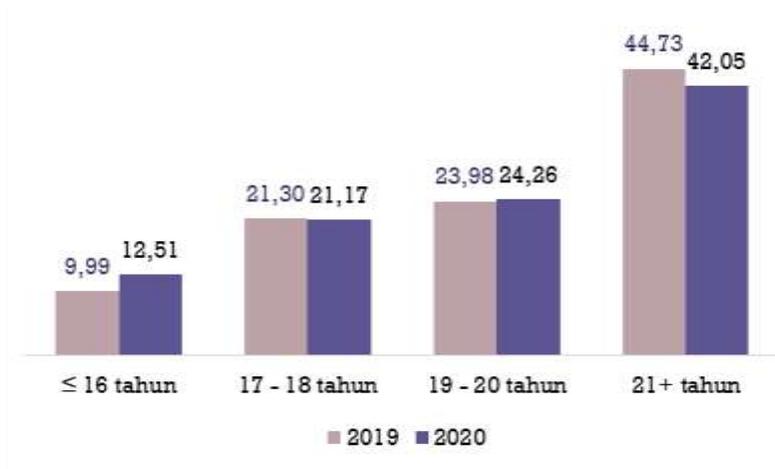
Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai

angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Gambar 1.3 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama. Pada rentang tersebut, kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar pada kelompok umur 19-20 tahun, dan umur 21 tahun ke atas mempunyai tingkat fertilitas tinggi. Dapat dilihat bahwa perempuan usia 21 tahun ke atas memiliki persentase terbesar, yaitu 42,05 persen pada tahun 2020, tetapi mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 44,73. Hal tersebut seiring dengan peningkatan persentase perempuan berusia 16 tahun ke bawah pada perkawinan pertama, yaitu 9,99 persen pada tahun 2019 menjadi 12,51 persen pada tahun 2021. Gambaran ini menjelaskan bahwa pergeseran usia kawin pertama menjauhi kondisi ideal, yaitu pada umur 21 tahun ke atas. Hal ini perlu perhatian lebih baik dari masyarakat pribadi maupun pemerintah dalam pemahaman terkait perkawinan, karena baik secara mental maupun kesiapan kondisi kematangan reproduksi pada usia kurang dari 18 tahun belum dapat dikatakan matang dan siap untuk memasuki jenjang perkawinan.

Penggunaan Alat/Cara KB

Di samping pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program keluarga berencana (KB). Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang beragam jenisnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB, mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk keikutsertaan KB

dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, menyebabkan angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil susenas 2017-2020 di Kabupaten Indragiri Hulu, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai lebih dari 50 persen. Persentase perempuan yang sedang menggunakan KB mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 50,83 persen dan kembali meningkat menjadi 53,37 persen pada tahun 2020.

Tabel 1.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Status Penggunaan Alat KB	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ya, Pernah	13,65	10,34	15,75	17,78
Ya, Sedang	58,72	60,53	50,83	53,37
Tidak	27,63	29,13	33,42	28,85
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2017-2020

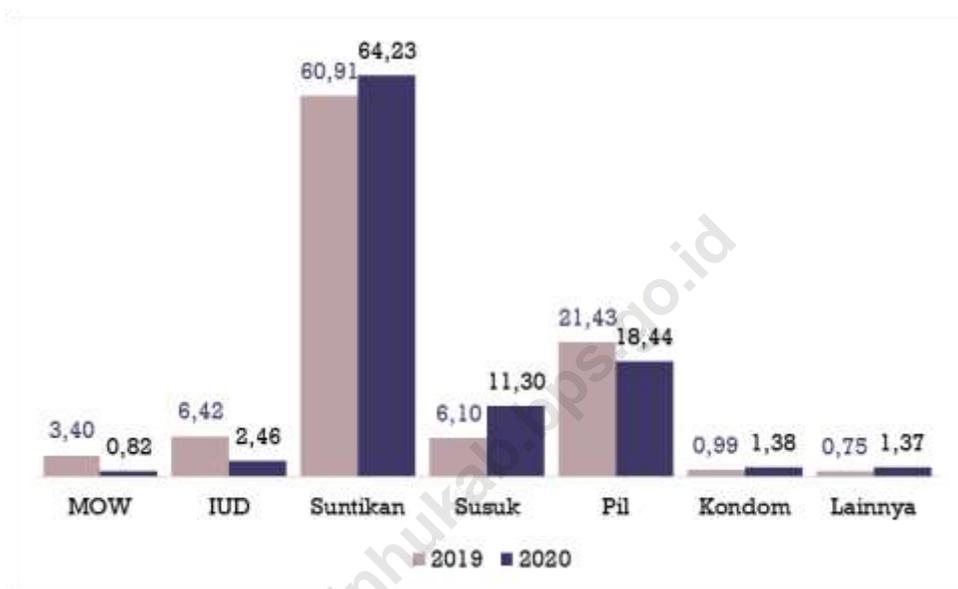
Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Gambar 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, penggunaan suntikan dan pil merupakan yang paling banyak diminati di Kabupaten Indragiri Hulu. Penggunaan suntikan mengalami peningkatan dari sebesar 60,91 persen pada tahun 2019 menjadi 64,23 persen pada tahun 2020. Begitu pula dengan penggunaan susuk KB/implan yang meningkat 5,20 persen menjadi 11,30 persen pada tahun 2020. Sementara itu, penggunaan pil mengalami penurunan dari 21,43 persen pada tahun 2019 menjadi 18,44 persen pada tahun 2020. Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah tubektomi/MOW, AKDR/IUD/spiral, kondom/karet KB, dan metode lainnya yang masing-masing persentasenya kurang dari 3 persen pada tahun 2020.

Perlu upaya yang lebih dari pemerintah dan peningkatan peran serta masyarakat agar penggunaan KB dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun, diantaranya dengan edukasi dan sosialisasi pentingnya program Keluarga Berencana, agar keluarga menjadi lebih sejahtera dari berbagai sisi, baik kesehatan, finansial, maupun pendidikan. Dilihat dari pertumbuhannya, alat/cara KB yang persentase penggunaannya menurun adalah MOW dan IUD.

Gambar 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat /Cara KB di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

BAB II



KESEHATAN DAN GIZI

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka dukungan dalam proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah juga semakin baik, dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah dilakukan. Pemerintah memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Angka Kesakitan

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (*Morbidity Rate*). Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya.

Pada umumnya, keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Pada gambar 2.1 menunjukkan besarnya persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menurut jenis kelamin pada tahun 2019-2020.

Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Pada tahun 2020, persentase penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah 32,17 persen. Dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan persentase angka kesakitan sebesar 7,45 persen.

Pada tahun 2020, angka kesakitan menurut jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan, masing-masing mengalami peningkatan. Adapun persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan meningkat pesat sebesar 10,37 persen dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 33,51 persen pada tahun 2020. Sedangkan peningkatan persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan kurang dari setengah peningkatan persentase laki-laki, sehingga mencapai 30,76 persen.

Tabel 2.1 menunjukkan sekitar seperempat penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memilih mengobati keluhannya dengan berobat jalan. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan berobat jalan pada tahun 2020 sebesar 25,13 persen. Persentase penduduk yang berobat jalan, baik laki-laki maupun perempuan, masih dianggap rendah. Persentase penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan berobat jalan (26,82 persen) lebih tinggi dibandingkan perempuan (23,21 persen). Hal ini mengandung arti kesadaran penduduk laki-laki terhadap kesehatannya lebih baik daripada perempuan.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

Indikator	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan (%)	33,51	30,76	32,17
Penduduk yang berobat jalan (%)	26,82	23,21	25,13

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 yang bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial. Kepemilikan jaminan kesehatan berhubungan dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi risiko kesehatan yang akan ditanggung di masa datang. Dengan memiliki jaminan kesehatan, seseorang akan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan ketika melakukan perawatan di fasilitas kesehatan.

Kepemilikan jaminan kesehatan juga perlu diimbangi dengan pemanfaatannya. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 67,32 persen penduduk tidak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Penduduk laki-laki yang tidak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 70,03 persen, lebih besar dibandingkan dengan perempuan sebesar 63,75 persen. Kondisi ini berkebalikan dengan kondisi pada tahun 2019 bahwa secara persentase, lebih banyak penduduk perempuan yang tidak memanfaatkan jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak

digunakan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 adalah BPJS Kesehatan baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020

Jaminan Kesehatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan PBI	15,62	12,79	14,41
BPJS Kesehatan Non-PBI	4,33	14,85	8,86
Jamkesda	11,01	5,63	8,70
Asuransi Swasta	0,00	0,00	0,00
Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor	0,89	4,18	2,30
Tidak Menggunakan Jaminan	70,03	63,75	67,32

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2020

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Pada umumnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk. Sepanjang tahun 2019, fasilitas kesehatan yang lebih banyak dimanfaatkan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu untuk berobat jalan adalah rumah sakit pemerintah sekitar 39,22 persen. Begitu juga pada tahun 2020, fasilitas kesehatan tersebut masih menjadi yang paling banyak dimanfaatkan, tetapi mengalami penurunan persentase menjadi 32,93 persen. Begitu pula dengan penggunaan fasilitas kesehatan rumah sakit swasta yang menurun dari 35,11 persen pada tahun 2019 menjadi 28,30 persen di tahun 2020. Penggunaan fasilitas kesehatan klinik/praktek dokter bersama mengalami kenaikan drastis sebanyak 13,03 persen pada tahun 2020

sehingga menjadi 29,04 persen. Sementara itu, penduduk yang berobat pada praktek pengobatan tradisional semakin berkurang, terutama pada tahun 2019-2020 yang mulai terjadi pandemi Covid-19.

Secara menyeluruh, kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Kondisi ini didukung dengan penurunan persentase penduduk yang berobat ke Praktek Pengobatan Tradisional.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2020

Fasilitas Kesehatan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RS Pemerintah	5,44	6,53	39,22	32,93
RS Swasta	3,20	5,47	35,11	28,30
Praktek Dokter/Bidan	52,13	43,92	7,95	2,80
Klinik/Praktek Dokter Bersama	19,19	20,38	16,01	29,04
Puskesmas/Pustu	29,47	33,01	10,52	12,11
UKBM*	1,23	0,00	0,00	0,00
Praktek Pengobatan Tradisional	0,87	1,40	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2017-2020

Keterangan:

1. Penduduk yang berobat jalan bisa terhitung lebih di satu tempat berobat (Kuesioner VSEN15-K) sehingga persentase di tempat berobat bisa lebih dari 100 persen
2. UKBM* terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

BAB III



PENDIDIKAN

BAB III

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana,

kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

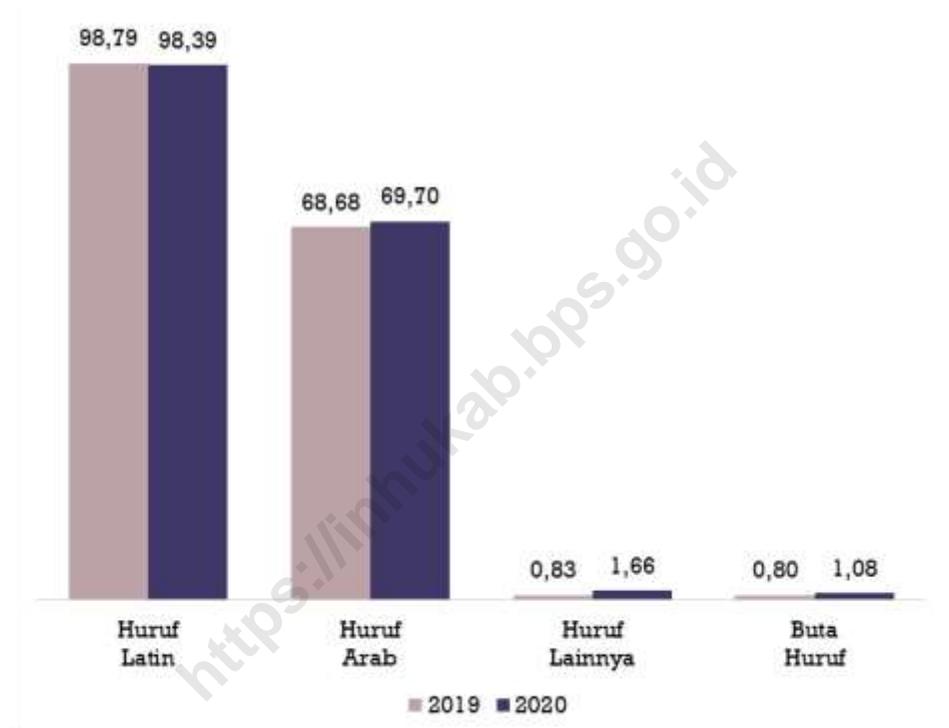
Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk menuju kehidupan sejahtera. Kemampuan baca-tulis tercermin dari angka melek huruf, dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya.

Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna dapat mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan

persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Huruf di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) sebesar 98,39 persen. Angka Melek Huruf ini sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 98,79 persen. Kemampuan membaca dan menulis huruf arab dan huruf lainnya kembali mengalami peningkatan, masing-masing dari 68,68 persen dan 0,83 persen pada 2019 menjadi 69,70 persen dan 1,66 persen pada 2020.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang buta huruf menunjukkan peningkatan dari 0,80 persen pada tahun 2019 menjadi 1,08 persen pada tahun

2020. Diperlukan penggalakkan program pemberantasan buta huruf sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Penting demi keberhasilan program ini dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

Rata-rata Lama Sekolah

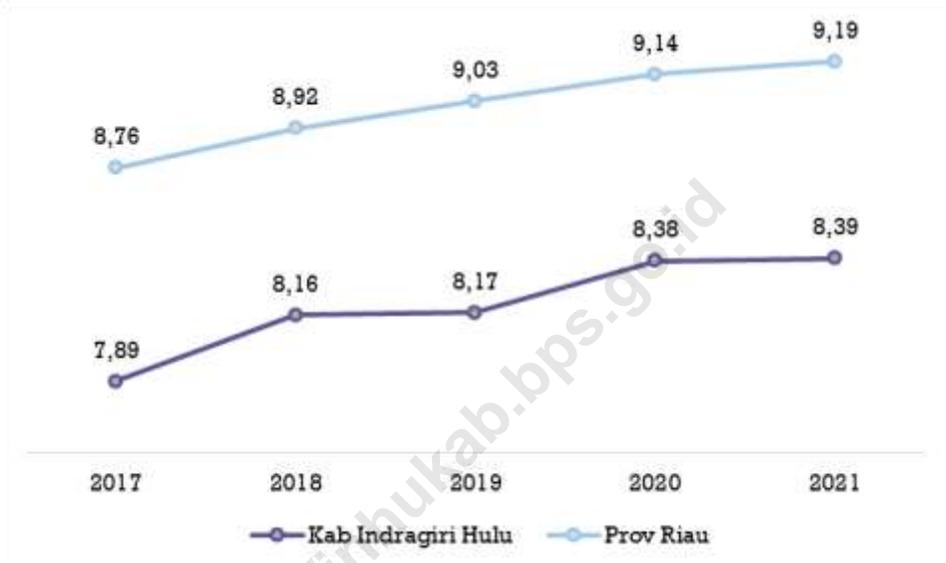
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan. Sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi angka IPM yang mencerminkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan fasilitas pendidikan, mutu tenaga pendidik dan sekolah, serta akses jalan hingga ke pelosok daerah guna menghindari anak yang putus sekolah.

Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 sebesar 8,39 tahun atau mengalami kenaikan 0,5 poin dalam lima tahun terakhir. Hal ini berarti bahwa rata-rata

penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu baru menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab Indragiri Hulu

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Indragiri Hulu berusia 15 tahun keatas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keadaan ini diiringi dengan meningkatnya penduduk 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah dari 14,81 persen pada 2019 menjadi 15,24 persen pada 2020. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah pendidikan tinggi (diploma/sarjana) pun ikut naik dari 6,89 persen di tahun 2019 menjadi 9,13 persen di tahun 2020. Dari tabel 3.2 juga dapat dilihat juga bahwa berdasarkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Indragiri Hulu paling banyak adalah pada jenjang SD/MI yaitu sebanyak 25,48 persen pada tahun 2020.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai	14,81	15,24
SD/MI	28,21	25,48
SMP/MTs	22,66	23,76
SMA/MA	21,64	21,36
SMK/MAK	5,78	5,02
Diploma dan Sarjana	6,90	9,14

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang

dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, seperti SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), SMA (16-18 tahun). APS di sini termasuk pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Dari tabel 3.2 dapat dilihat APS penduduk berumur 7-12 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 98,44 persen menjadi 99,03 persen pada tahun 2020. Artinya, hampir semua penduduk usia 7-12 tahun memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Sedangkan APS penduduk berumur 13-15 tahun menurun menjadi 94,82 persen. Begitu pula dengan APS penduduk berumur 16-18 tahun menjadi 73,46 persen. Penurunan APS pada kedua kelompok umur ini menunjukkan bahwa pendidikan semakin sulit diakses oleh penduduk.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020

Kelompok Umur, Jenis Kelamin	2019	2020
(1)	(2)	(3)
7-12 Tahun	98,44	99,03
Laki-laki	98,26	98,84
Perempuan	98,61	99,24
13-15 Tahun	95,71	94,82
Laki-laki	93,06	91,77
Perempuan	98,38	99,15
16-18 Tahun	73,79	73,46
Laki-laki	61,19	69,97
Perempuan	90,58	76,47

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Dilihat dari segi jenis kelamin, angka partisipasi sekolah penduduk perempuan terlihat lebih baik pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki banyak memilih berhenti sekolah yang dapat disebabkan karena bekerja membantu orang tua.

Jika pada APS tidak memerhatikan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur, maka pada APM mempertimbangkan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur sebagai dasar penghitungan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Dengan cara penghitungan tersebut, maka APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan juga proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat dilihat APM untuk setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan pada tahun 2020. APM SD meningkat dari 98,44 persen

pada tahun 2019 menjadi sebesar 98,45 persen pada tahun 2020. Sama halnya dengan APM SMP dan SMA, dimana APM SMP meningkat dari 76,33 persen pada 2019 menjadi 77,10 persen pada 2020, dan APM SMA meningkat dari 59,70 persen pada 2019 menjadi 59,83 persen pada 2020.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin	2019	2020
(1)	(2)	(3)
SD	98,44	98,45
Laki-laki	98,26	98,84
Perempuan	98,61	98,06
SMP	76,33	77,10
Laki-laki	79,32	76,10
Perempuan	73,30	78,53
SMA	59,70	59,83
Laki-laki	52,40	49,59
Perempuan	69,43	68,66

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2019-2020

Menurut jenis kelamin, APM laki-laki meningkat pada tingkat pendidikan SD, sedangkan APM perempuan meningkat pada tingkat pendidikan SMP. Baik APM laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan SMA mengalami penurunan pada tahun 2020. Semakin besar angka APM menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan putra-putrinya sesuai dengan umurnya (tepat waktu).

BAB IV



KETENAGAKERJAAN

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Salah satu kendala yang menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai dinamika ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan melalui berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). TPAK menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum bekerja.

Sementara TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Indragiri Hulu pada Agustus 2021 mencapai 219.518 jiwa, bertambah secara absolut sebanyak 16 ribu jiwa dibanding Agustus 2019 (203.043 jiwa). Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode yang sama diiringi dengan kenaikan persentase TPAK. Persentase TPAK mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen dari 65,94 persen pada Agustus 2019 menjadi 68,45 persen pada Agustus

2021, yang artinya kenaikan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja jauh lebih banyak dibandingkan kenaikan penduduk kerja usia kerja (15 tahun ke atas).

Berbeda dengan TPAK yang meningkat dalam tiga tahun terakhir, TPT Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan adanya fluktuasi. TPT pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen dari tahun sebelumnya dan menurun kembali sebesar 1,59 persen menjadi 3,32 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, terdapat sekitar tiga atau empat orang yang merupakan pengangguran. Adanya pengangguran terbuka mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang belum optimal memanfaatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menekan jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangkutan Terbuka di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)
TPAK	65,94	68,42	68,45
TPT	4,79	4,91	3,32

Sumber : Sakernas 2019-2021 (diolah)

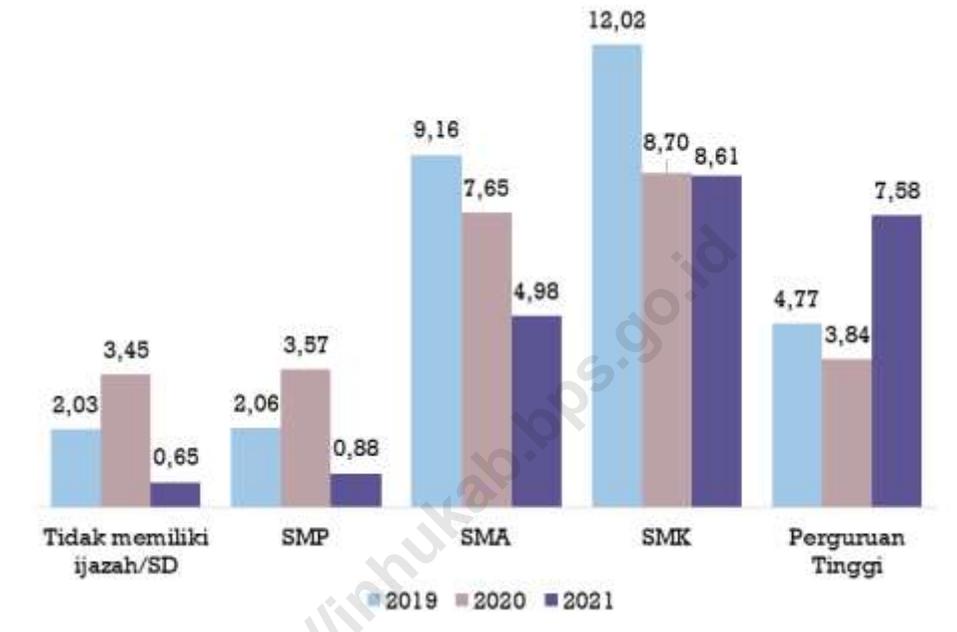
Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka

tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Bila dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan dalam tiga tahun terakhir, penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang tamat SMK merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi. Pada tahun 2018, TPT kelompok penduduk ini sebesar 12,02 yang kemudian turun drastis menjadi 8,70 di tahun 2020. Angka ini semakin menurun pada tahun 2021 menjadi 8,61. Begitu pula dengan penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SMA ke bawah yang menunjukkan angka TPT yang menurun pada tahun 2019-2021. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pengangguran pada lulusan jenjang pendidikan tersebut beralih ke arah yang lebih baik.

Lain halnya dengan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu lulusan perguruan tinggi. TPT kelompok penduduk ini menurun dari 4,77 pada tahun 2019 menjadi 3,84 pada tahun 2020. Namun mengalami peningkatan drastis sebesar 3,74 menjadi 7,58 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi belum/tidak terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021



Sumber : Sakernas 2019-2021 (diolah)

Status Pekerjaan Utama

Persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang bekerja didominasi oleh penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai) sebesar 33,15 persen pada tahun 2019 dan semakin meningkat menjadi 38,97 persen pada tahun 2021. Berwiraswasta merupakan pekerjaan yang mendominasi pasar kerja Kabupaten Indragiri Hulu kedua setelah buruh/karyawan/pegawai. Penduduk yang berusaha/wiraswasta mengalami peningkatan sebesar 9,79 persen dari 28,88 persen pada 2019 menjadi 38,07 persen pada 2021. Peningkatan ini terutama terjadi pada penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, yaitu

masing-masing sebesar 8,79 persen dan 1,93 persen selama tiga tahun terakhir, sementara untuk penduduk yang berusaha sendiri mengalami penurunan sebesar 1,53 persen. Di tahun-tahun yang akan datang diharapkan agar penduduk yang berusaha/wiraswasta terus mengalami peningkatan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama mengembangkan usaha ekonomi kreatif, dimana dapat menambah lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat berusaha/wiraswasta sehingga tidak bergantung pada upah/gaji dari pihak lain.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2021

Status Pekerjaan Utama	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja dengan upah/gaji	33,15	37,15	38,97
Berusaha/wiraswasta	28,88	39,54	38,07
Berusaha sendiri	22,06	23,65	20,53
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	4,90	12,96	13,69
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1,91	2,93	3,84
Pekerja bebas	6,34	10,79	9,21
Pekerja keluarga/tak dibayar	31,63	12,51	13,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2019-2021 (diolah)

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja baru di daerahnya sendiri, sehingga akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong wirausaha baik

berupa pemberian modal, keterampilan, penghargaan, dan yang lain bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

<https://inhukab.bps.go.id>

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang stigma bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	578.961	591.987	621.395	50,48	50,90	49,91
Bukan Makanan	568.036	570.976	623.749	49,52	49,10	50,09
Kabupaten Indragiri Hulu	1.146.997	1.162.963	1.245.144	100,00	100,00	100,00

Sumber: - Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, 2019-2020
- Susenas 2021 (diolah)

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2019-2021. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2019-2021 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu dari meningkat dari Rp1.146.997,- pada tahun 2019 menjadi Rp1.245.144,- pada tahun 2021.

Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran antara untuk makanan dan bukan makanan mengalami perubahan pada tahun 2021. Persentase pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, yang semula 50,48 persen pada tahun

2019 menjadi 49,91 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk bukan makanan meningkat dari 49,52 persen menjadi 50,09 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga dalam jenis pengeluaran non makanan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

BAB VI



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah

sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu jenis dan luas lantai rumah, jenis atap rumah yang digunakan, dan jenis dinding rumah terluas.

Dari tabel 6.1 dapat dilihat dari kualitas perumahan di Kabupaten Indragiri Hulu, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantai bukan tanah menunjukkan adanya penurunan di tahun 2019 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,80 persen. Adapun dilihat dari jenis atap terluas, persentase kualitas rumah dengan atap layak cenderung tetap dalam tiga tahun terakhir, dimana sebesar 99,52 persen pada tahun 2020. Sementara itu,

rumah dengan dinding terluas menggunakan tembok atau kayu mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 menjadi 95,51 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Indikator Kualitas Perumahan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis lantai terluas bukan tanah (%)	99,39	99,17	98,80
Jenis atap terluas beton, genteng, asbes, seng, sirap (%)	99,55	99,37	99,52
Jenis dinding terluas tembok dan kayu/papan (%)	94,59	94,27	95,51

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

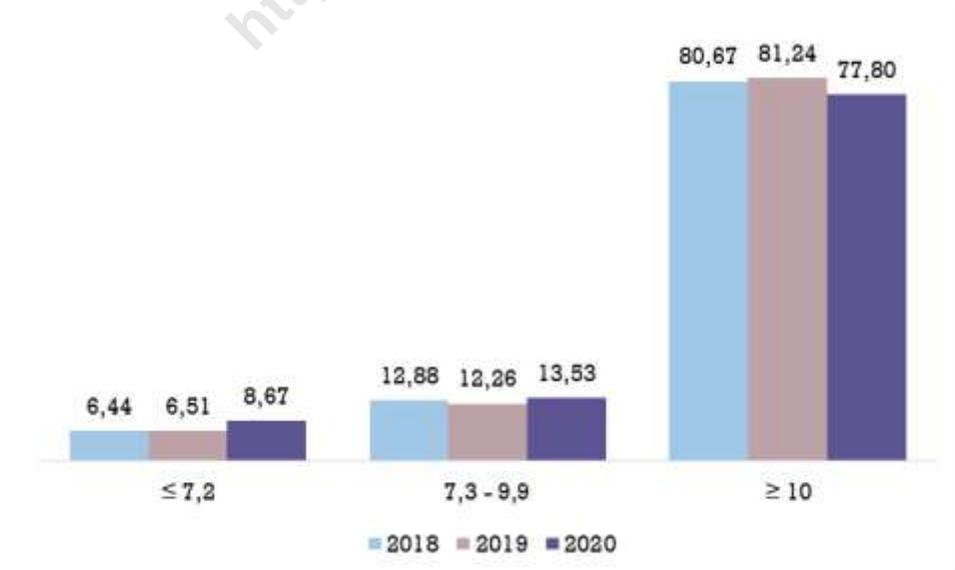
Lantai rumah merupakan salah satu sarana berkumpul dan bermain anggota rumah tangga. Lantai yang luas dan jenisnya yang berkualitas lebih memungkinkan anggota rumah tangga untuk beraktivitas secara leluasa. Relevansinya dengan kesehatan, lantai menjadi sarana kontak anggota rumah tangga dengan kemungkinan berbagai penyakit. Bahkan jenis lantai merupakan salah satu variabel dalam penentuan keluarga sejahtera atau prasejahtera. Dengan demikian, jenis dan luas lantai di samping menggambarkan keadaan sosial ekonomi, juga sangat vital dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah luas lantai per kapita yang merupakan rata-rata luas lantai yang ditempati tiap anggota rumah tangga.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas

seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai perkapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Pada tahun 2020, luas lantai rumah yang ditempati rumah tangga dapat dijadikan pendekatan dalam menilai kesejahteraan rumah tangga. Di Kabupaten Indragiri Hulu, rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita lebih dari 10 meter persegi merupakan mayoritas dengan persentase sebesar 77,80 persen pada tahun 2020. Sedangkan rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,3 meter persegi sebesar 8,67 persen pada tahun 2020.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita (m²) di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal layak adalah jenis lantai bukan tanah. Lantai bukan tanah terdiri dari lantai marmer/granit, keramik, parket/vinil/permadani, ubin/tegel/teraso, kayu/papan/bambu, serta semen/bata merah.

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu telah menempati rumah dengan jenis lantai bukan tanah. Mayoritas rumah tangga menggunakan semen/bata merah sebagai bahan utama lantai rumahnya, dengan persentase 54,53 persen pada tahun 2020. Bahan keramik dan kayu/papan/bambu juga banyak digunakan, dengan persentase masing-masing 24,07 persen dan 16,16 persen di tahun 2020.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Marmer/Granit	1,36	1,30	1,34
Keramik	25,48	25,85	24,07
Parket/Vinil/Karpet	0,00	0,11	0,58
Ubin/Tegel/Teraso	0,50	1,37	2,12
Kayu/Papan/Bambu	14,92	18,12	16,16
Semen/Bata Merah	57,13	52,42	54,53
Tanah	0,61	0,83	1,20
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Atap merupakan bagian bangunan tempat tinggal yang berfungsi untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca yang tidak diinginkan (panas, hujan, angin, dll). Kemampuan atap dalam melindungi penghuni rumah tergantung dari jenis bahan dasar atap. Atap yang layak adalah atap yang terbuat dari beton, asbes, seng, dan sirap.

Dari tabel 6.3 dapat dilihat bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan seng sebagai bahan utama atap rumah terluas. Pada periode tahun 2018-2020, persentase penggunaan atap seng mengalami peningkatan dari 88,84 persen pada tahun 2018 menjadi 91,69 persen pada tahun 2020.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Bahan Bangunan Utama Atap Terluas	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Beton	2,06	2,15	1,52
Genteng	4,02	2,85	4,63
Asbes	4,63	5,93	1,68
Seng	88,84	88,44	91,69
Lainnya	0,45	0,63	0,48
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Penggunaan dinding rumah dikatakan memenuhi syarat kesehatan jika dinding tersebut tidak lembab, tidak berlumut, dan tidak mudah ditembus angin. Dinding juga harus kokoh agar dapat melindungi penghuninya dari ancaman gempa maupun penyakit.

Tabel 6.4 menunjukkan bahwa rumah di Kabupaten Indragiri Hulu hampir seluruhnya berdinding layak dan kokoh. Lebih dari setengah rumah berdinding tembok dengan persentase yang terus meningkat pada tahun 2018-2020, dengan persentase tahun 2020 sebesar 57,26 persen. Sedangkan rumah dengan jenis dinding kayu terjadi penurunan persentase menjadi 38,25 persen pada tahun 2020.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Tembok	51,74	57,01	57,26
Kayu	42,85	37,26	38,25
Bambu	5,41	5,13	4,40
Lainnya	0,00	0,60	0,09
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik.

Meskipun rumah merupakan kebutuhan pokok, namun kualitas air juga sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama air yang bersih dan layak minum. Normalnya manusia memerlukan air minum rata-rata 1,5 liter (± 8 gelas) per hari sehingga perlu pengadaan air minum yang cukup pada setiap rumah tangga.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 menyebutkan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kualitas sumber air minum perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari kontaminasi bibit penyakit. Sumber air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran/eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung

yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan limbah/kotoran terdekat.

Dilihat dari sumber air rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu, hampir sebagian rumah tangga yang ada memilih air kemasan bermerk/air isi ulang sebagai air minumannya. Persentase penggunaan air kemasan/isi ulang meningkat dari tahun 2018 sebesar 47,73 persen menjadi 49,32 persen pada tahun 2020.

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama yang Digunakan untuk Minum di Kabupaten Indragiri Hulu 2018-2020

Sumber Air Utama untuk Minum	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerk/ air isi ulang	47,73	47,77	49,32
Leding	5,00	8,32	3,21
Sumur bor/pompa	12,74	7,01	16,51
Sumur terlindung	15,74	17,71	16,08
Sumur tak terlindung	15,00	13,86	11,70
Lainnya	3,79	5,33	3,18
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

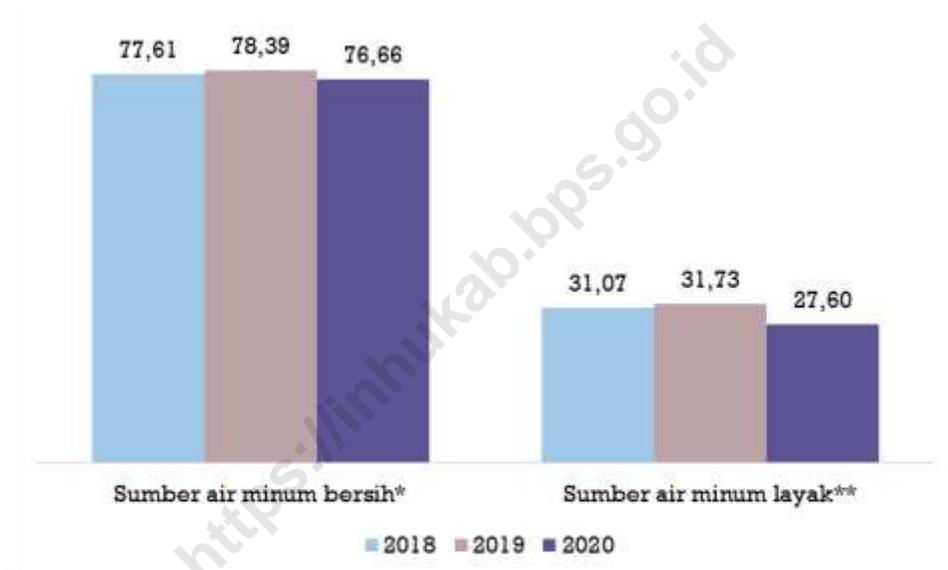
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Untuk sumber air minum layak, konsep yang digunakan meliputi leding meteran dan eceran, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran/tinja. Jarak sumber air minum (yang berasal dari pompa, sumur, dan mata air) ke tempat penampungan kotoran sangat memengaruhi kualitas air minum.

Berdasarkan gambar 6.2, besarnya persentase rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu yang menggunakan air minum bersih mengalami penurunan

pada periode tahun 2018-2020. Terdapat sebanyak 77,61 persen rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih pada tahun 2018. Persentase ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 78,39 persen yang kemudian menurun menjadi 76,66 persen pada tahun 2020.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Bersih dan Layak di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Catatan: *) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m]

***) Terdiri dari leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m]

Indikator lain yang digunakan untuk melihat fasilitas rumah tangga adalah fasilitas sanitasi berupa tempat buang air besar (BAB). Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain

itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

Kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Sehingga perlu diketahui aspek kepemilikan terhadap sarana buang air besar yang digunakan oleh rumah tangga. Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri dengan persentase lebih dari 82 persen pada tahun 2018-2020. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan tempat buang air besar sendiri telah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga.

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Indragiri Hulu 2018-2020

Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	88,15	82,28	89,57
Bersama	2,87	3,59	2,47
MCK komunal, umum	1,26	0,87	0,68
Ada, tidak digunakan	0,00	0,12	0,31
Tidak ada	7,72	13,14	6,97
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Indikator lain terkait fasilitas tempat buang air besar adalah jarak antara tempat penampungan tinja dengan sumber air yang digunakan sehari-hari oleh rumah tangga, terutama sumber air minum. Jarak yang dapat dikatakan sebagai jarak sehat adalah sejauh 10 meter.

Selama tahun 2018-2020, persentase rumah di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki sumber air minum berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran semakin menurun. Persentase rumah dengan jarak lebih dari 10 meter pada tahun 2018 adalah 87,27 persen dan semakin turun menjadi 77,31 persen pada tahun 2020.

Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa/Sumur Terlindung/Mata Air Terlindung Menurut Jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat di Kabupaten Indragiri Hulu 2018-2020

Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
< 10 m	11,78	15,26	19,36
≥ 10 m	87,27	80,86	77,31
Tidak tahu	0,95	3,88	3,33
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Indikator fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah sumber penerangan rumah. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik sebab lebih praktis dan modern serta cahaya listrik lebih terang dan tidak menimbulkan polusi. Rumah tangga yang menggunakan listrik, baik yang bersumber dari PLN maupun non PLN, dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang tidak menggunakan listrik, seperti sumber penerangan menggunakan pelita, senter, obor, dan sebagainya.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, hampir semua rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama rumahnya. Dari pengguna listrik

tersebut, 96,52 persen menggunakan listrik PLN dan 2,18 persen menggunakan listrik non PLN pada tahun 2020.

Tabel 6.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Sumber Penerangan Utama	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik PLN	91,71	93,41	96,52
Listrik Non PLN	6,77	3,75	2,18
Bukan Listrik	1,52	2,84	1,30
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Lebih dari 80 persen rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu menempati rumah milik sendiri pada periode tahun 2018-2020. Rumah milik sendiri dianggap rumah merupakan milik kepala keluarga atau salah seorang anggota rumah tangga tersebut. Selain itu pada tahun 2020, rumah tangga yang

menempati rumah bebas sewa sebesar 10,67 persen dan sisanya kurang dari 9 persen.

Tabel 6.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018-2020

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	80,70	82,82	80,42
Kontrak/sewa	5,37	6,00	6,57
Bebas sewa	11,65	8,05	10,67
Rumah dinas	1,99	2,93	2,34
Lainnya	0,29	0,20	0,00
Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2018-2020

<https://inhukab.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Beban Ketergantungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 dan diatas 65 tahun) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun keatas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pekerja Tidak Dibayar

Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Air Minum Layak

Air minum yang terdiri dari air ledeng, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter]

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah:

- Yang mencari pekerjaan
- Yang mempersiapkan usaha
- Yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
- Yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jl. Batu Canai Pematang Reba 29315
Telp (0769) 341285
Homepage <https://inhukab.bps.go.id/>